

PERANG DRONE DAN TANKER DI TIMUR-TENGAH

Poltak Partogi Nainggolan

7

Abstrak

Rivalitas Arab Saudi-Iran di Timur-Tengah terus berlangsung dan meluas, sehingga mengundang negara besar yang berkepentingan, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris terlibat di dalamnya. Terhentinya Kesepakatan Nuklir Iran Tahun 2015 sejak tahun 2018 memperkuat rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur-Tengah. Tekanan dan embargo terhadap Iran yang meningkat telah memicu perang drone dan saling sita tanker di Selat Hormuz dan Teluk Persia, yang merambah ke luar kawasan, antara Iran versus AS dan Inggris. Risiko bahaya yang meningkat akibat perang drone dan tanker di Selat Hormuz dan Teluk Persia telah mendorong Jerman dan Perancis, serta Uni Emirat Arab mencari terobosan dengan menghidupkan kembali pendekatan diplomatik. Sayangnya, inisiatif yang semula memberi harapan ini belum direspons positif oleh pihak-pihak yang bertikai. Tanpa terobosan yang lebih maju dan keterlibatan PBB, prospek stabilitas keamanan Selat Hormuz dan Teluk Persia rawan dari pecahnya perang terbuka antara Iran vis a vis AS dan sekutu Arab dan Baratnya.

Pendahuluan

Eskalasi konflik di Timur-Tengah meningkat lebih cepat pasca-serangan pesawat udara nirawak (*drone*) pemberontak Houthi di Yaman, yang didukung Iran, ke sasaran-sasaran di selatan Arab Saudi pada 1 Juli 2019, termasuk bandara di Jizan dan Abha, dan jaringan pipa minyak sepanjang 1.200 kilometer. Iran juga dituding telah menembak jatuh *drone* Amerika Serikat (AS) di perairan internasional, dan selanjutnya menyerang kapal-kapal tanker di Teluk Oman yang

merupakan jalur vital transportasi minyak dunia. Angkatan Laut (AL) AS, dengan USS Boxer, kapal serbu amfibi, membalasnya dengan menghancurkan drone Iran yang mengancamnya ketika tengah mengawal tanker berbendera AS itu di pintu masuk Selat Hormuz.

Perang menggunakan *drone* telah meluas ke sasaran tanker AS dan sekutunya, terutama Inggris, ke Selat Hormuz dan Teluk Persia, yang kemudian dikontrol ketat Iran. Kapal cepat Garda Revolusi Iran (IRGC) pun kembali menahan tanker milik Uni Emirat Arab



(UEA) pada 16 Juli 2019, karena diduga telah menyelundupkan bahan bakar (Koran Jakarta, 19 Juli 2019). Sebelumnya, pada 11 Juli 2019, 3 kapal perang IRGC berupaya mencegah kapal tanker Inggris, *British Heritage*, yang melintas di Selat Hormuz, namun berhasil digagalkan setelah kapal AL Inggris, *HMS Montrose*, segera mengamatkannya.

Aksi-aksi Iran yang agresif di kawasan Teluk telah direspons secara tegas oleh AL AS dan Inggris. Secara sepihak, Inggris bahkan akan menambah kehadiran kapal perangnya, yaitu *HMS Kent*, dari 2 yang sudah beroperasi, yaitu *HMS Montrose* dan *HMS Duncan*, di sana. Sebelumnya, tanker Iran, *Grace 1*, yang tengah berlayar di Selat Gibraltar, telah dihentikan dan disita oleh marinir AL Inggris, karena diduga melakukan pelanggaran sanksi ekonomi Uni Eropa. *Grace 1* diduga akan mengirimkan bahan bakar ke pihak yang mendukung pemerintah Suriah.

Marah atas tindakan AL Inggris yang menahan kapal tanker-nya, Iran melancarkan balasan, dengan menghentikan dan menahan kapal tanker berbendera Inggris, *Stena Impero*, saat melewati Selat Hormuz, pada 19 Juli 2019. Iran mengklaim kapal Inggris ini menggunakan jalur yang salah dan telah mematikan sinyalnya lebih lama dari yang diizinkan. Aksi penyitaan oleh IRGC Iran di Selat Hormuz itu sendiri ditafsirkan Inggris sebagai balasan atas penyitaan *Grace 1* milik Iran (Koran Tempo, 27 Juli 2019). Berikutnya, IRGC menyita sebuah kapal di Teluk Persia, yang ditengarai membawa bahan

bakar selundupan, sehingga menjadikannya sebagai kasus penyitaan kapal ketiga yang dilakukan Iran atas kapal komersial dalam beberapa minggu terakhir (Kompas dan Republika, 5 Agustus 2019). Tujuh awak kapal ditahan dan 700 ribu bahan bakar selundupan asal Iran disita.

Aksi penyerangan lewat *drone* dan sita kapal tanker, berlanjut di perairan, dan mendorong eskalasi ketegangan di Timur-Tengah lebih cepat lagi. Baik pihak yang terlibat maupun tidak dalam perang *drone* dan tanker ini secara sadar melihat perkembangan situasi yang lebih buruk, yang dapat memicu pecahnya konflik militer terbuka, setiap saat. Konflik di kawasan Teluk tidak lagi bersifat terbatas antara AL Iran versus AS dan Inggris, tetapi telah memprovokasi negara-negara lain di dalam maupun luar kawasan untuk terlibat, seperti perang di Suriah.

Yang lebih buruk, perang *drone* dan tanker antara Iran versus AS dan Inggris di Timur Tengah dikhawatirkan berimplikasi luas ke tingkat global. Tulisan ini mengkaji penyebab pokok instabilitas di perairan di Timur-Tengah secara lebih luas dan konsekuensinya atas prospek keamanan di kawasan tersebut dewasa ini, serta langkah terobosan apa yang dapat dilakukan demi mencegah eskalasi ketegangan yang mudah berubah menjadi perang terbuka antara negara-negara yang berkepentingan.

Penyebab Instabilitas

Munculnya eskalasi ketegangan di Selat Hormuz adalah kelanjutan dari perang *drone* dan saling sita tanker di antara Arab Saudi, AS

dan Inggris versus Iran di Timur-Tengah, menyusul *proxy war* mereka di Yaman, yang masing-masing mendukung pemerintah Ali Abdullah Saleh dan penggantinya, Abd Rabbuh Mansur Hadi, versus pemberontak Houthi yang mengudetanya pada tahun 2015. Konflik Arab Saudi dan AS vis a vis Iran memanas akibat dibatalkannya secara unilateral *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) oleh Pemerintah Trump. Padahal, ini semula dianggap solusi terbaik agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, yang dapat mengancam stabilitas keamanan Timur-Tengah, dengan kompensasi dibebaskannya Iran dari segala bentuk embargo ekonomi Barat.

Terganggunya JCPOA bukan satu-satunya penyebab eskalasi ketegangan di Teluk Oman, Selat Hormuz dan Teluk Persia sekarang ini, melainkan juga perubahan lingkungan strategis di Timur-Tengah. Manuver Iran yang ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan regional terbesar pasca-jatuhnya rezim Saddam Hussein di Irak ini juga yang merupakan persoalan kunci. Stabilitas regional yang telah terganggu telah memotivasi rezim *Mullah*, pengikut Syiah yang konservatif, di Iran, tampil ke muka mengisi kevakuman kekuasaan pasca-Saddam serta anarki berkepanjangan di Irak dan kawasan secara menyeluruh. Iran selanjutnya berkepentingan mempengaruhi kekuatan-kekuatan Syiah di beberapa negara, untuk berkuasa dan memenangkan pemilu, antara lain di Suriah, Lebanon, dan Libya.

Untuk mencegah sukses Iran sebagai kekuatan regional baru

yang dominan, Arab Saudi dan negara Teluk, seperti Qatar dan UEA, berupaya mencegahnya, sambil menggandeng kekuatan Barat, terutama AS dan Inggris, bekas penjajah sebagian besar kawasan itu. Tidak heran, Yaman lalu menjadi korban perang kepentingan Iran versus Arab Saudi dan Barat. Kegagalan Barat pada tahun 2018 dalam menahan AS menaati JCPOA membuat Pemerintah Trump leluasa mengenakan sanksi ekonomi atas Iran. Sanksi inipun dibalas Iran dengan melanjutkan program pengayaan uranium, yang akan membawa Iran sebagai negara kekuatan nuklir baru. Langkah AS menghentikan program pengayaan uranium Iran dan mencegahnya untuk bisa memiliki senjata nuklir telah menyebabkan respons Pemerintah Iran yang lebih agresif.

Implikasi Luas

Serangan udara dengan menggunakan *drone* telah menimbulkan perang *drone* dan mengalami eskalasi dengan saling serang tanker serta menyita muatan dan awal kapalnya. Serangan oleh Iran ke fasilitas Arab Saudi telah meluas ke kapal-kapal berbendera asing lain, terutama AS dan Inggris, selain Iran sendiri oleh seterusnya. Reaksi keras AS dan Inggris diperlihatkan dengan pengerahan kapal-kapal perang dan militer ke daratan dan perairan Timur-Tengah, khususnya Selat Hormuz dan Teluk Persia. Ironisnya, sebelum ini, Presiden Trump telah melakukan penarikan pasukan AS secara bertahap dari Suriah, Irak dan Aghanistan, sambil mendorong solusi diplomatik dengan Taliban, walaupun Pemerintah Afghanistan

belum bersikap kooperatif dan percaya pada Taliban. Langkah Trump diambil, selain demi efisiensi, untuk menekan risiko ancaman terhadap warga AS yang berada di Timur-Tengah.

Eskalasi ketegangan di perairan berlanjut dengan upaya saling-incar *drone* dan menyita tanker lawan. Sebagai konsekuensinya, pihak yang bertikai dan negara lain yang berkepentingan turun tangan melakukan pengawalan tanker dan kapal-kapal dagang dan komersial mereka untuk menghindari kerugian. Selain AS dan Inggris yang mengirimkan kapal perang mereka, Korea Selatan telah siap menggerakkan unit AL dan kapal perusak (*destroyer*) ke Selat Hormuz, bergabung dengan kekuatan militer pimpinan AS. Untuk menghindari ancaman Iran, London juga telah meminta semua kapal menjauhi Teluk Oman, Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Untuk memperluas dan meningkatkan dukungan dan berbagi tanggung jawab dalam menghadapi ancaman Iran di perairan Timur-Tengah, AS dan Inggris telah meluncurkan gagasan pembentukan Pasukan Maritim Eropa. Langkah ini disambut positif dan didukung Italia, Denmark, dan Belanda. Sedangkan Prancis dan Jerman bersikap lebih hati-hati, dengan mengingatkan eskalasi berbahaya, yang dapat segera terjadi (Kompas, 20 Juli 2019).

Apa yang terjadi di Teluk Oman, Selat Hormuz, dan Teluk Persia telah menguatkan persepsi masyarakat internasional pada ancaman keamanan yang telah berdimensi luas dewasa ini (Buzan

et al, 1998). Secara lebih spesifik, dunia telah diingatkan bahwa ancaman keamanan energi dan ekonomi dapat berimplikasi luas pada munculnya keamanan militer, yang bisa berakhir dengan konflik bersenjata atau perang secara terbuka antara lebih dari satu negara.

Terobosan Jerman dan UEA

Di antara negara Barat penandatanganan JCPOA, hanya Jerman yang melihat bahwa misi militer di Teluk Oman, Selat Hormuz, dan Teluk Persia sangat mengundang risiko keamanan dan ancaman konflik regional yang lebih besar (Republika, 1 Agustus 2019). Karena itulah, didukung Prancis, Jerman mendorong semua pihak menaati JCPOA sambil mengingat perlunya membantu pemulihan ekonomi Iran, dan bukan sebaliknya, meneruskan sanksi, bahkan secara lebih berat, sehingga menimbulkan aksi provokatif Teheran (Kompas, 1 Agustus 2019).

Menyadari bahaya eskalasi konflik akibat saling serang *drone* dan saling sita tanker, Jerman mengambil inisiatif meredamnya dengan mengirim Menlu Heiko Maas, ke Teheran. Menlu Haas kelihatan masih percaya pada solusi diplomatik lewat perundingan dan negosiasi dengan negara-negara di kawasan Teluk dan dengan AS. Teheran sebenarnya telah merespons ini dengan memberi sinyal positif menegosiasikan kebijakan nuklirnya, jika AS bersedia mencabut sanksi ekonominya.

Tanpa diduga sebelumnya, inisiatif diplomasi juga telah

diambil Uni Emirat Arab (UEA), yang selama ini dikenal sebagai sekutu Arab Saudi dalam rivalitasnya dengan Iran. Perubahan sikap UEA akhir-akhir ini telah ditunjukkan dengan menciptakan hubungan yang lebih berimbang antara Arab Saudi dan Iran di tengah sikap Barat dan Arab Saudi yang terus menyudutkan Iran. Manuver baru UEA diharapkan tidak hanya mengubah peta rivalitas, namun juga dapat memperbaiki sikap Iran untuk mau berdialog lagi. Dalam kenyataannya, untuk membebaskan tankernya, respons Inggris yang keras juga telah memaksa Iran untuk membuka kontak dengan Inggris (Koran Jakarta, 14 Agustus 2019).

Penutup

Pasca-pendekatan diplomatik Jerman dan UEA, Iran telah mengungkapkan kesiapannya untuk berdialog dengan Arab Saudi. Sayangnya, sinyal ini cepat berganti dengan sikap baru AS maupun Iran yang saling mengancam, sehingga mendorong terjadinya eskalasi ketegangan baru. Stabilitas keamanan di perairan Teluk Oman, Selat Hormuz, dan Teluk Persia dalam kenyataannya belum dapat dipulihkan.

Kehadiran kapal-kapal perang AS, Inggris dan Iran, serta gelar alutsista yang saling mengancam, sangat rawan memprovokasi pecahnya konflik militer terbuka di antara kekuatan regional dan global. Iran sendiri terus menuding AS telah membuat perairan Teluk menjadi semakin mudah tersulut perang dan terbakar

akibat pengaliran senjata dan pembangunan kekuatan militernya. Oleh karena itu, manuver Jerman dan UEA seharusnya didukung PBB, terutama Dewan Keamanan, untuk mendorong upaya diplomatik yang lebih signifikan agar dapat mencegah pecahnya perang di kawasan Teluk, dan Timur-Tengah secara lebih luas.

Referensi

- Abd Rahman, Musthafa. "Pertemuan Iran-UEA Ubah "Peta" Kawasan." *Kompas*, 1 Agustus 2019, hal. 5.
- Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Frame-work for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- "Dalam Dua Pekan, Iran Tangkap 3 Tanker," *Kompas*, 5 Agustus 2019, hal. 4.
- Dikarma, Kamran. "Iran Siap Berdialog dengan Arab Saudi," *Republika*, 1 Agustus 2019, hal. 7.
- "Inggris Tolak Lepas Tanker," *Kompas*, 30 Juli 2019, hal. 4.
- "Inggris Bergabung dengan Koalisi Maritim Pimpinan AS di Teluk Persia," *Kompas*, 7 Agustus 2019, hal. 4.
- "Iran Siap Berdalog dengan Arab-Saudi," *Republika*, 5 Agustus 2019, hal. 7.
- "Jerman Ingatkan Iran-AS," *Kompas*, 20 Juli 2019, hal. 5.
- "Kapal Perang Inggris Kawal Tanker di Selat Hormuz," *Koran Tempo*, 27 Juli 2019, hal. 5.
- Malley, Robert. "America should talk to the Houthis," *The New York Times International*

Edition, 7 Agustus 2019, hal. 10.
"Iran Hubungi Inggris untuk
Bebaskan Tanker." *Koran Jakarta*,
19 Juli 2019, hal. 4.
"Provokasi Israel dan Keamanan
Teluk." *Kompas*, 1 Agustus 2019,
hal. 6.

Satria, Lintar. "Iran Kembali Sita
Kapal Tanker Komersial,"
Republika, 5 Agustus 2019, hal.
7.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Kemitraan Strategis Indonesia- Amerika Serikat - RRC di Asia Pasifik" (2013), "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015), dan "Indonesia di Tengah Persaingan China, Jepang, dan India" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.